



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Perubahan Rencana Kerja

**BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH
PROVINSI RIAU**
Tahun 2024



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 33 TAHUN 2024

TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024, maka Rencana Kerja Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 perlu dilakukan penyesuaian;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dinyatakan Bappeda menyampaikan seluruh Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 111);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 630);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2009 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dan dokumen lainnya yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : HASIL PELAKSANAAN EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

BAB III : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV : PENUTUP

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

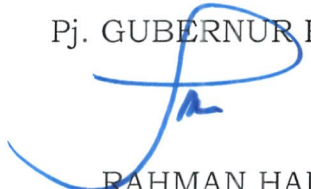
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

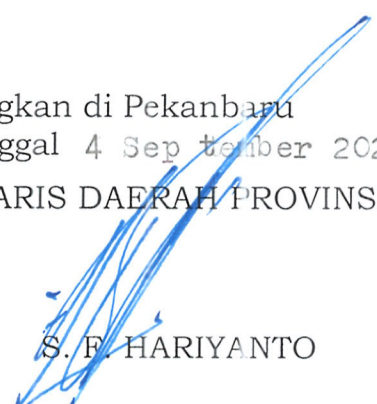
Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 September 2024

Pj. GUBERNUR RIAU,


RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 September 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,


S. F. HARIYANTO

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2024 NOMOR : 33

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

DAFTAR TABEL..... ii

BAB I : PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 3

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II 4

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran per Program dan Kegiatan 4

2.2. Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024 6

2.3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 10

BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH 11

3.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024..... 11

BAB IV PENUTUP 15

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Tabel Realisasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau	4
Tabel 2.2	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	17
Tabel 2.3	Capaian Indikator Kinerja BKD Provinsi Riau	10
Tabel 2.4	Capaian Kinerja SPM Provinsi Riau	10
Tabel 3.1.	Rencana Program dan Kegiatan Pada Perubahan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024	12

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, lokasi, kelompok sasaran, indikator kinerja, dan pendanaan sesuai tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renja disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renja OPD merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang mengarahkan program dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah serta pembangunan daerah secara umum. Penyusunan Renja OPD merupakan dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Renja OPD juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Dengan demikian, Renja OPD memiliki kedudukan strategis dalam menghubungkan perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang mencakup tata cara perencanaan, pengendalian, evaluasi pembangunan daerah, serta perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan tindak lanjut dari evaluasi rencana kerja tahun berjalan, dengan mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Perubahan Renstra BKD 2019-2024. Sesuai Pasal 343 ayat (1) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan jika hasil evaluasi pelaksanaan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian perencanaan dan penganggaran di BKD Provinsi Riau disebabkan oleh:

- 1) Penyesuaian penganggaran terhadap agenda dan kebijakan nasional terbaru.
- 2) Penyesuaian target kinerja program dan kegiatan, pergeseran anggaran, serta pemenuhan kebutuhan mendesak.

Dengan adanya penyesuaian tersebut, Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi pedoman yang lebih akurat dan relevan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada sisa tahun anggaran 2024.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan hukum yaitu:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai mana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024.
11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 12 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61);
14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 22);
15. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau
16. Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 31 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 31);
18. Surat Edaran Gubernur Riau Nomor 2350/SE/2024 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Tahun 2024.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2024 adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD Provinsi Riau di Tahun 2024 melalui perencanaan kinerja tahunan. Adapun tujuan dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2024 adalah :

- 1) Sebagai pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau untuk memastikan pencapaian target tahunan Rencana Strategis yang telah ditetapkan dan RPJMD Provinsi Riau di tahun 2024;
- 2) Sebagai instrumen akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan laporan kinerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2024 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan Triwulan II Tahun 2024
- 2.3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan

Evaluasi pelaksanaan anggaran program dan kegiatan memberikan gambaran mengenai realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau hingga triwulan II tahun 2024. Evaluasi ini bertujuan untuk mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Dengan melakukan evaluasi, dapat diidentifikasi program dan kegiatan yang telah berjalan sesuai rencana, serta yang mengalami kendala atau keterlambatan dalam pelaksanaannya. Data serapan anggaran program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Belanja
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Urian	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Triwulan II (Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Tidak Langsung	20.118.029.622	10.982.226.172	54.59
Belanja Langsung	14.639.532.292	4.701.257.671	32.11
Total Belanja	34.757.561.914	15.683.483.843	45.12

Dilihat dari data tabel 2.1 di atas, realisasi anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan Trwiulan II Tahun 2024 adalah 45,12% atau Rp. 15.683.483.843. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan target yang telah disusun dalam Rencana Anggaran Kas Tahun 2024 yaitu 64,53% atau Rp. 21.759.462.070. Keterlambatan capaian realisasi antara lain disebabkan oleh:

- 1) Kebijakan Seleksi Calon ASN formasi Tahun 2024 menunggu petunjuk teknis dari Kemenpan-RB
- 2) Pembiayaan pendidikan lanjutan bagi PNS Tugas Belajar belum berjalan sesuai jadwal dikarenakan belum dimulainya periode pembayaran SPP bagi mahasiswa baru
- 3) Jadwal Pelatihan Kepemimpinan Nasional PKN II yang masih berlangsung
- 4) Masih minimnya PNS yang mengikuti sertifikasi jabatan fungsional
- 5) Perubahan jadwal MTQ Nasional KORPRI di Provinsi Kalimantan Tengah

Tabel 2.2
Realisasi Pelaksanaan Anggaran Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Triwulan II (Rp)	%
1	2	3	4
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	25.175.476.222	13,396,672,172	53.21
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.118.029.622	10,982,226,172	54.59

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Triwulan II (Rp)	%
1	2	3	4
Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	20.118.029.622	10,982,226,172	54.59
Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.536.896.944	978,977,600	63.70
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	49.954.580	49,350,033	98.79
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	316.827.198	268,940,000	84.89
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	457.226.923	281,313,316	61.53
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	153.202.213	94,808,100	61.88
Penyediaan Bahan/Material	23.836.030	23,547,611	98.79
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	535.850.000	261,018,540	48.71
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.812.389.656	1,159,516,400	41.23
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	705.203.800	301,587,832	42.77
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.107.185.856	857,928,568	40.71
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	708.160.000	275,952,000	38.97
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	41.730.000	24,670,000	59.12
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	342.940.000	91,632,000	26.72
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	238.860.000	159,650,000	66.84
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.630.000		-
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	9.582.085.692	2,286,811,671	23.86
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	2.166.129.042	460,968,400	21.28
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	34.849.117	23,432,793	67.24
Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	640.662.910	241,239,937	37.65
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	365.972.770	65,004,211	17.76
Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	716.145.268	7,782,599	1.09
Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	37.049.845	13,060,000	35.25
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	249.508.650	88,157,700	35.33
Pengelolaan Data Kepegawaian	24.752.602		-

Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran s/d Triwulan II (Rp)	%
1	2	3	4
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	97.187.880	22,291,160	22.94
Mutasi dan Promosi ASN	890.473.111	385,390,396	43.28
Pengelolaan Mutasi ASN	272.062.264	184,819,633	67.93
Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	350.393.419	122,336,656	34.91
Pengelolaan Promosi ASN	268.017.428	78,234,107	29.19
Pengembangan Kompetensi ASN	5.735.396.377	1,330,147,531	23.19
Pengelolaan Assessment Center	570.524.611	144,372,304	25.31
Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	92.369.703	17,362,149	18.80
Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	2.648.329.373	493,200,000	18.62
Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	611.916.134	221,888,862	36.26
Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	944.343.247	228,906,710	24.24
Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	635.463.712	99,226,529	15.61
Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	232.449.597	125,190,977	53.86
Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	790.087.162	110,305,344	13.96
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	28.516.500	7,677,752	26.92
Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	517.507.057	8,798,415	1.70
Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	51.893.031	7,385,718	14.23
Pembinaan Disiplin ASN	157.314.895	77,195,050	49.07
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	34.855.679	9,248,409	26.53

Sumber: BKD Provinsi Riau, 2024

2.2. Evaluasi Renja Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2024

Evaluasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau hingga triwulan II tahun 2024 merupakan alat untuk mengukur efektivitas strategi yang digunakan dalam upaya pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah. Evaluasi ini bertujuan untuk:

- 1) Mengidentifikasi kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan.
- 2) Mengukur realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra OPD.
- 3) Mengidentifikasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada pencapaian indikator program dan kegiatan yang tertuang dalam Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 dan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024. Hasil evaluasi Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2024 sampai dengan triwulan II disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.3.
EVALUASI HASIL RENJA BADAN KEPEGAWIAN DAERAH PROVINSI RIAU TRIWULAN II
PERIODE PELAKSANAAN : 2024

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU 203			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PROVINSI RIAU TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		
												I		II										
			K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	4	5	6			7			8			9		10		13=9+10+11+12		14=13/8x100		15=13+7		16=15/6x100		
5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum						5.661.890.913			5.057.446.600		993.292.065		1.421.153.935		2.414.446.000							
5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum						2.448.304.694			1.536.896.944		208.146.360		770.831.240		978.977.600			-		-		
5.03.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2	Paket	67.150.000	1	Paket	77.417.636	1	Paket	49.954.580,00	-		-	-	49.350.033	-	49.350.033	-	98,79	1	126.767.669	50	189
5.03.01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	510.000.000	3	Paket	735.433.441	2	Paket	316.827.198,00	1		-	-	268.940.000	1	268.940.000	50,00	84,89	4	1.004.373.441	67	197
5.03.01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2	Paket	575.000.000	1	Paket	217.620.000	1	Paket	457.226.923,00	-	78.811.003,00		-	202.502.313	-	281.313.316	-	61,53	1	498.933.316	50	87
5.03.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2	Paket	465.400.000	1	Paket	278.301.497	1	Paket	153.202.213,00	-	44.833.100,00		-	49.975.000	-	94.808.100	-	61,88	1	373.109.597	50	80
5.03.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2	Paket	60.800.000	1	Paket	145.378.699	1	Paket	23.836.030,00	-		-	-	23.547.611	-	23.547.611	-	98,79	1	168.926.310	50	278
5.03.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2	Laporan	1.384.608.000	1	Laporan	994.153.421	1	Laporan	535.850.000,00	-	84.502.257,00		-	176.516.283	-	261.018.540	-	48,71	1	1.255.171.961	50	91
5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.806.086.484			2.812.389.656		647.460.705		512.055.695	-	1.159.516.400			-	-	-	-	
5.03.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang Dikirim	2	Laporan	8.000.000	1		6.927.000																
5.03.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	24	Laporan	1.584.140.000	12	Laporan	676.722.332	12	Laporan	705.203.800,00	3	130.366.233,00	3	171.221.599	6	301.587.832	50,00	42,77	18	978.310.164	75	62	
5.03.01.1.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang	2	Laporan	290.000.000	1		97.055.000																
5.03.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24	Laporan	4.415.000.000	12	Laporan	2.032.309.152	12	Laporan	2.107.185.856,00	3	517.094.472,00	3	340.834.096	6	857.928.568	50,00	40,71	18	891.969.568	75	20	
5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						407.499.735	-		708.160.000		137.685.000		138.267.000	-	275.952.000			-	428.998.735	-	-	
5.03.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	Unit	155.000.000	1	Unit	34.041.000	1	Unit	41.730.000,00	-	6.000.000	1	18.670.000	1	24.670.000	100,00	59,12	2	58.711.000	14	38	

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU 203			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PROVINSI RIAU TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024			
			K		Rp.	K		Rp.	K		Rp.	I		II		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2	4	5	6			7			8			9		10		13=9+10+11+12		14=13/8x100		15=13+7		16=15/6x100			
5.03.01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	14	Unit	155.000.000	13	Unit	153.046.735	14	Unit	342.940.000,00	3	28.500.000,00	4	63.132.000	7	91.632.000	50,00	26,72	20	244.678.735	143	158		
5.03.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	290	Unit	120.000.000	145	Unit	140.967.000	229	Unit	238.860.000,00	98	103.185.000,00	39	56.465.000	137	159.650.000	59,83	66,84	282	239.095.000	97	199		
5.03.01.1.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Ruangan	140.000.000	1	Unit	79.445.000	1	Unit	84.630.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	79.445.000	50	57		
Rata-rata Capaian Kinerja(%)																		29,99	57,56			55,08	96,99		
Predikat Kinerja																		Sangat Rendah	Rendah			Rendah	Sangat Tinggi		
5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Pelayanan ASN yang terselesaikan						7.270.888.975			9.582.085.692		821.850.684		1.464.960.987		2.286.811.671								
5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN yang terselesaikan						1.847.378.742			2.166.129.042	-	195.663.480		265.304.920		460.968.400								
5.03.02.1.01.02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	2	Dokumen	80.000.000	1	Dokumen	37.823.944	1	Dokumen	34.849.117,00	-	5.654.980	-	17.777.813	-	23.432.793	-	67,24	1	61.256.737	50	77		
5.03.02.1.01.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2	Dokumen	1.255.000.000	1	Dokumen	611.125.329	1	Dokumen	640.662.910,00	-	119.173.300,00	-	122.066.637	-	241.239.937	-	37,65	1	445.230.385	50	38		
5.03.02.1.01.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2	Dokumen	395.000.000	1	Dokumen	203.990.448	1	Dokumen	365.972.770,00	-	480.000	-	64.524.211	-	65.004.211	-	17,76	1	581.476.201	50	147		
5.03.02.1.01.08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	2	Lembaga	250.000.000	1	Lembaga	516.471.990	1	Lembaga	716.145.268,00	-	-	-	7.782.599	-	7.782.599	-	1,09	1	229.656.176	50	92		
5.03.02.1.01.09	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	2	Dokumen	190.500.000	1	Dokumen	83.995.999	1	Dokumen	37.049.845,00	-	-	-	13.060.000	-	13.060.000	-	35,25	1	45.217.329	50	-		
5.03.02.1.01.10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Dokumen	500.000.000	1	Dokumen	221.873.577	1	Dokumen	249.508.650,00	-	70.355.200	-	17.802.500	-	88.157.700	-	35,33	1	120.315.029	50	24		
5.03.02.1.01.11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	2	Dokumen	86.000.000	1	Dokumen	32.157.329	1	Dokumen	24.752.602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	139.940.126	50	163		
5.03.02.1.01.12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	2	Laporan	285.000.000	1	Laporan	139.940.126	1	Laporan	97.187.880,00	-	-	-	22.291.160	-	22.291.160	-	22,94	1	1.024.123.838	50	359		
5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pelaksanaan Mutasi dan Promosi ASN						1.001.832.678			890.473.111		200.104.094		185.286.302	-	385.390.396			-		-			
5.03.02.1.02.01	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen laporan penataan PNS pindah tugas	2	Dokumen	655.000.000	1	Dokumen	311.872.148	1	Dokumen	272.062.264,00	-	82.181.585,00	-	102.638.048	-	184.819.633	-	67,93	1	560.735.257	50	86		
5.03.02.1.02.02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah berkas ASN yang dikelola	4	Laporan	860.000.000	2	Laporan	375.915.624	2	Laporan	350.393.419,00		65.528.996,00	1	56.807.660	1	122.336.656	50,00	34,91	3	436.381.562	75	51		
5.03.02.1.02.03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen penataan	2	Dokumen	600.000.000	1	Dokumen	314.044.906	1	Dokumen	268.017.428,00	-	52.393.513,00	-	25.840.594	-	78.234.107	-	29,19	1	4.026.896.015	50	671		
5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pengembangan Kompetensi ASN						3.948.661.908			5.735.396.377		412.551.110		917.596.421	-	1.330.147.531			-		-			
5.03.02.1.03.02	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah dokumen seleksi jabatan pimpinan tinggi	2	Dokumen	1.399.000.000	1	Dokumen	483.395.223	1	Dokumen	570.524.611,00	-	19.532.328,00	-	124.839.976	-	144.372.304	-	25,31	1	228.777.173	50	16		
5.03.02.1.03.03	Pengeloan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	2	Dokumen	240.000.000	1	Dokumen	84.404.869	1	Dokumen	92.369.703,00	-		-	17.362.149	1	17.362.149	100,00	18,80	2	1.555.130.228	100	-		

KODEFIKASI	URUSAN/BIDANG/URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET RENSTRA PADA TAHUN 2019 - 2024			REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN LALU 203			TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PROVINSI RIAU TAHUN BERJALAN YANG DIEVALUASI (2024)			REALISASI KINERJA PADA TRIWULAN				REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD YANG DIEVALUASI TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PD TAHUN 2024 (%)		REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024		TINGKAT CAPAIAN REALISASI KINERJA DAN ANGGARAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2024	
												I		II									
			K	Rp.	K		Rp.	K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K
2	4	5	6			7			8			9		10		13=9+10+11+12		14=13/8x100		15=13+7		16=15/6x100	
5.03.02.1.03.04	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	2	Dokumen	5.100.503.145	1	Dokumen	1.537.768.079	1	Dokumen	2.648.329.373,00	-	260.800.000,00	-	232.400.000	-	493.200.000	-	18,62	1	1.045.001.154	50	20
5.03.02.1.03.05	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	2	Dokumen	1.290.000.000	1	Dokumen	551.801.154	1	Dokumen	611.916.134,00	-	38.573.305,00	-	183.315.557	-	221.888.862	-	36,26	1	562.032.127	50	44
5.03.02.1.03.06	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Sertifikasi Jabatan ASN	12	Orang	1.400.278.892	4	Orang	340.143.265	7	Orang	944.343.247,00	-	-	4	228.906.710	4	228.906.710	57,14	24,24	8	569.049.975	67	41
5.03.02.1.03.10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	80	Orang	1.235.468.200	40	Orang	665.650.890	55	Orang	635.463.712,00	-	-	15	99.226.529	15	99.226.529	27,27	15,61	55	384.724.957	69	31
5.03.02.1.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pengembangan Karier Dalam Jabatan Fungsional	2	Dokumen	775.000.000	1	Dokumen	285.498.428	1	Dokumen	232.449.597,00	-	93.645.477,00	-	31.545.500	-	125.190.977	-	53,86	1	410.689.405	50	53
5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						473.015.647			790.087.162	-	13.532.000		96.773.344	-	110.305.344			-		-	
5.03.02.1.04.02	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2	Dokumen	198.000.000	1	Dokumen	58.381.030	1	Dokumen	28.516.500,00	-	-	-	7.677.752	-	7.677.752	-	26,92	1	66.058.782	50	33
5.03.02.1.04.04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	40	Orang	199.500.000	20	Orang	95.575.122	20	Orang	517.507.057,00	-	-	-	8.798.415	-	8.798.415	-	1,70	20	76.346.097	50	38
5.03.02.1.04.05	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan tanda jasa	2000	Orang	198.000.000	1.000	Orang	67.547.682	1000	Orang	51.893.031,00	-	-	500	7.385.718	500	7.385.718	50,00	14,23	1.500	165.313.136	75	83
5.03.02.1.04.07	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	160	Orang	460.000.000	80	Orang	157.927.418	80	Orang	157.314.895,00	7	13.532.000	9	63.663.050	16	77.195.050	20,00	49,07	96	170.779.445	60	37
5.03.02.1.04.08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	2	Laporan	227.400.000	1	Laporan	93.584.395	1	Laporan	34.855.679,00	-	-		9.248.409	-	9.248.409	-	26,53	1	102.832.804	50	45
																		13,24	28,72			49,82	83,34
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Sangat Rendah	Tinggi
																		21,61	43,14			52,45	90,17
																		Sangat Rendah	Sangat Rendah			Rendah	Tinggi

Berdasarkan Tabel 2.3 di atas, dapat dilihat bahwa sebagian target capaian indikator kinerja kegiatan sudah menunjukkan progres cukup baik. Sedangkan beberapa kegiatan yang lain masih menunggu jadwal pelaporan dokumen di akhir tahun anggaran 2024. Hal ini dikarenakan sebagian besar output sub-kegiatan berupa dokumen sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

2.3. Evaluasi Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah dilakukan dengan mengukur pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Pencapaian indikator kinerja ini merupakan bagian dari rencana kerja pemerintah daerah yang bertujuan untuk mendukung misi Kepala Daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berikut disajikan capaian realisasi indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau sampai dengan triwulan II Tahun 2024:

Tabel 2.4.
Capaian Indikator Kinerja BKD Provinsi Riau

NO	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2024	REALISASI SAMPAI TW II	CAPAIAN (%)
1.	Indeks Sistem Merit	325	318	97,8
2.	Nilai SAKIP	77,20	78,80	102

Sumber: BKD Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan Tabel 2.4. di atas, realisasi capaian indeks sistem merit adalah 97,8% dikarenakan masih menggunakan data capaian tahun 2023. Adapun capaian tahun 2024 akan dirilis oleh Komisi Aparatur Sipil Negara pada akhir tahun anggaran 2024. Sedangkan capaian nilai SAKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau adalah 102% berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Nomor: 244/LHE/INSP-RIAU/IR.III/VII/2024 Tanggal 28 Juni 2024.

Evaluasi kinerja pelayanan perangkat daerah juga diharapkan menyajikan capaian terhadap Standar Pelayanan Minimal yang diampu oleh perangkat daerah. Namun demikian, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Urusan Kepegawaian yang diampu oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tidak termasuk dalam SPM yang ditetapkan.

Tabel 2.5.
Capain Kinerja SPM Perangkat Daerah

NO	SPM	TARGET 2024	PERUBAHAN TARGET 2024	REALISASI SAMPAI TW II
1.				
2.				
3.				
4.				

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 merupakan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan kinerja dan anggaran sampai dengan Triwulan II Tahun 2024. Rumusan target kinerja dan besaran anggaran disusun dengan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga Triwulan II Tahun 2024, sebagai dasar untuk menentukan target dan alokasi anggaran yang realistis untuk sisa tahun anggaran.
- 2) Perubahan kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, termasuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah pusat yang berdampak pada program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah.
- 3) Hasil evaluasi dan rekomendasi dari berbagai pemangku kepentingan, untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan.
- 4) Tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, serta langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasinya.
- 5) Kebutuhan anggaran untuk melaksanakan program dan kegiatan prioritas, dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dan potensi pendapatan daerah.
- 6) Sinergi dan integrasi dengan program dan kegiatan perangkat daerah lainnya, untuk mengoptimalkan hasil dan dampak pembangunan bagi masyarakat.

Adapun rincian perubahan rencana program dan kegiatan serta target indikator kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 dituangkan dalam Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD)
Provinsi Riau Tahun 2024

Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Sub Unit Organisasi : 5.03.0.00.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Keterangan
			Target 2024		Pagu (Rp.)						
			Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Realisasi			Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang	
(Rp) Keuangan			% Keuangan	% Fisik							
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-6	(12)
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				34.757.561.914	17.508.666.280	50,37	51,58	35.974.205.311	1.216.643.397	
5 3	KEPEGAWAIAN				34.757.561.914	17.508.666.280	50,37	51,58	27.963.626.529	-6.793.935.385	
5 3 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Bidang Kepegawaian	100	100	25.175.476.222	15.053.187.841	59,79	68,00	27.963.626.529	2.788.150.307	
5 3 1 1	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang dipenuhi	1	1	20.118.029.622	12.469.261.863	61,98	62,50	21.526.861.267	1.408.831.645	
5 3 1 1 1	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan	116	124	20.118.029.622	12.469.261.863	61,98	62,50	21.526.861.267	1.408.831.645	
5 3 1 1,1	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang dipenuhi	6	6	1.536.896.944	978.977.600	63,70	77,50	2.970.897.906	1.434.000.962	
5 3 1 1,1 1	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	49.954.580	49.350.033	98,79	100,00	88.230.560	38.275.980	
5 3 1 1,1 2	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3	3	316.827.198	268.940.000	84,89	85,00	1.124.949.185	808.121.987	
5 3 1 1,1 4	4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1	1	457.226.923	281.313.316	61,53	65,00	626.891.168	169.664.245	
5 3 1 1,1 5	5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	153.202.213	94.808.100	61,88	65,00	198.210.963	45.008.750	
5 3 1 1,1 7	7 Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1	1	23.836.030	23.547.611	98,79	100,00	23.836.030	0	
5 3 1 1,1 9	9 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1	1	535.850.000	261.018.540	48,71	50,00	908.780.000	372.930.000	
5 3 1 1,1	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipenuhi	4	4	2.812.389.656	1.327.749.776	47,21	50,00	2.684.387.356	-128.002.300	
5 3 1 1,1 2	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	705.203.800	301.587.832	42,77	50,00	679.201.500	-26.002.300	
5 3 1 1,1 4	4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	2.107.185.856	1.026.161.944	48,70	50,00	2.005.185.856	-102.000.000	
5 3 1 1,1	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	4	4	708.160.000	277.198.602	39,14	40,00	781.480.000	73.320.000	

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Keterangan	
			Target 2024		Pagu (Rp.)							
			Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Realisasi			Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang		
(Rp) Keuangan			% Keuangan	% Fisik								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-6	(12)	
5 3 1 1,1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dan Dibayarkan Pajaknya	1	1	41.730.000	24.670.000	59,12	60,00	41.730.000	0		
5 3 1 1,1	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	14	14	342.940.000	92.878.602	27,08	30,00	342.940.000	0		
5 3 1 1,1	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	229	229	238.860.000	159.650.000	66,84	70,00	312.180.000	73.320.000		
5 3 1 1,1	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	84.630.000	0	0,00	0,00	84.630.000	0		
5 3 2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	100	100	9.582.085.692	2.455.478.439	25,63	35,17	8.010.578.782	-1.571.506.910		
5 3 2 1		PENGADAAN, PEMBERHENTIAN DAN INFORMASI KEPEGAWAIAN ASN	100	100	2.166.129.042	490.041.160	22,62	30,38	2.415.853.540	249.724.498		
5 3 2 1	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1	1	34.849.117	23.432.793	67,24	70,00	34.849.117	0		
5 3 2 1	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1	1	640.662.910	241.239.937	37,65	40,00	640.662.910	0		
5 3 2 1	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	1	1	365.972.770	94.076.971	25,71	30,00	365.971.398	-1.372		
5 3 2 1	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	1	1	716.145.268	7.782.599	1,09	3,00	716.145.268	0		
5 3 2 1	9	Perumusan Bahan Kebijakan Pengelolaan Data dan Informasi ASN	1	1	37.049.845	13.060.000	35,25	37,00	146.210.425	109.160.580		
5 3 2 1	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	249.508.650	88.157.700	35,33	38,00	263.197.910	13.689.260		
5 3 2 1	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	1	1	24.752.602	0	0,00	0,00	24.752.602	0		
5 3 2 1	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1	97.187.880	22.291.160	22,94	25,00	224.063.910	126.876.030		
5 3 2 1		MUTASI DAN PROMOSI ASN	100	100	890.473.111	417.970.396	46,94	51,00	1.042.039.769	151.566.658		

KODE	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Keterangan	
			Target 2024		Pagu (Rp.)							
			Semula	Menjadi	APBD 2024 (Pergeseran APBD IV)	Realisasi			Perubahan RKPD Tahun 2024	Bertambah/ Berkurang		
(Rp) Keuangan			% Keuangan	% Fisik								
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)=10-6	(12)	
5 3 2 1	1	Pengelolaan Mutasi ASN	1	1	272.062.264	184.819.633	67,93	70,00	324.995.590	52.933.326		
5 3 2 1	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	2	2	350.393.419	154.916.656	44,21	50,00	443.797.754	93.404.335		
5 3 2 1	3	Pengelolaan Promosi ASN	1	1	268.017.428	78.234.107	29,19	33,00	273.246.425	5.228.997		
5 3 2 1		PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN	100	100	5.735.396.377	1.431.461.539	24,96	31,29	3.633.745.811	-2.101.650.566		
5 3 2 1	2	Pengelolaan Assessment Center	1	1	570.524.611	166.372.304	29,16	33,00	805.245.876	234.721.265		
5 3 2 1	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	1	1	92.369.703	17.362.149	18,80	20,00	76.235.703	-16.134.000		
5 3 2 1	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	1	1	2.648.329.373	493.200.000	18,62	20,00	1.147.408.773	-1.500.920.600		
5 3 2 1	5	Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	1	1	611.916.134	245.891.174	40,18	44,00	469.540.822	-142.375.312		
5 3 2 1	6	Fasilitasi Sertifikasi Jabatan ASN	7	5	944.343.247	279.739.806	29,62	30,00	435.102.667	-509.240.580		
5 3 2 1	10	Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	55	18	635.463.712	103.705.129	16,32	17,00	359.250.712	-276.213.000		
5 3 2 1	14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	1	1	232.449.597	125.190.977	53,86	55,00	340.961.258	108.511.661		
5 3 2 1		PENILAIAN DAN EVALUASI KINERJA APARATUR	100	100	790.087.162	116.005.344	14,68	28,00	918.939.662	128.852.500		
5 3 2 1	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	1	1	28.516.500	7.677.752	26,92	30,00	71.145.000	42.628.500		
5 3 2 1	4	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	20	20	517.507.057	8.798.415	1,70	5,00	517.507.057	0		
5 3 2 1	5	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	1000	1000	51.893.031	7.385.718	14,23	15,00	51.893.031	0		
5 3 2 1	7	Pembinaan Disiplin ASN	80	80	157.314.895	82.895.050	52,69	60,00	216.163.895	58.849.000		
5 3 2 1	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	1	1	34.855.679	9.248.409	26,53	30,00	62.230.679	27.375.000		
Jumlah					34.757.561.914	17.508.666.280	50,37	51,58	35.974.205.311	1.216.643.397		

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2024 disusun dengan memperhatikan evaluasi pelaksanaan anggaran dan capaian kinerja tahun berjalan. Hasil identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya serapan anggaran akan dijadikan fokus utama dalam meningkatkan efektifitas serapan anggaran dan pencapaian target kinerja di sisa tahun anggaran 2024.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau tahun 2024 antara lain:

- 1) Melaksanakan proses pengadaan calon ASN dengan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan Kemenpan-RB terkait petunjuk teknis pelaksanaan seleksi.
- 2) Menyesuaikan jadwal pembiayaan pendidikan lanjutan bagi PNS tugas belajar dengan mempertimbangkan kalender akademik perguruan tinggi tujuan.
- 3) Mengoptimalkan partisipasi PNS dalam program sertifikasi jabatan fungsional melalui sosialisasi, pendampingan, dan fasilitasi yang intensif.
- 4) Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seperti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) dan MTQ Nasional KORPRI, agar sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- 5) Memperkuat sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala, agar dapat diidentifikasi hambatan dan permasalahan secara dini serta dilakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- 6) Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan, seperti sistem informasi kepegawaian, pembelajaran secara daring, dan layanan kepegawaian berbasis elektronik, guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan.

Pekanbaru, 2024
**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI RIAU**

Dr. Ir. MAMUN MUROD, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19660610 199203 1 008